

Judul : Pemindahan Ibu Kota Jangan Terburu-buru
Tanggal : Kamis, 08 Agustus 2019
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Pemindahan Ibu Kota Jangan Terburu-buru



Rencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan masih menuai pro-kontra. Anggota DPR RI juga tak satu suara menyikapi rencana tersebut. Sebagian dari mereka meminta pemerintah tidak terburu-buru.

ANGGOTA Komisi V DPR Intan Fauzi meminta pemerintah mengkaji secara komprehensif dan matang rencana tersebut. Apalagi, ada beberapa negara yang dianggap berhasil dan juga kurang berhasil dalam memindahkan ibu kotanya.

Selain itu, banyak aspek yang harus diperhatikan karena pemindahan ibu

kota akan berdampak besar secara sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, dalam konteks negara maju, pemisahan antara ibu kota bisnis (business capital) dan ibu kota administratif (administrative capital) sudah dilakukan beberapa negara. Dengan pemisahan fungsi ibu kota Negara, maka tata kelola dan tata bisnis menjadi terpisah.

"Tetapi, dalam sejarahnya, ada negara yang berhasil dan ada pula negara yang kurang berhasil saat melakukan pemindahan ibu kota negaranya," katanya di Jakarta, Rabu (7/8).

Negara yang berhasil di antaranya Amerika Serikat, Rusia, Kanada, Australia, India, Brazil, Polandia, Italia, Yunani, Jerman, Finlandia dan Saudi Arabia. Sedangkan negara yang kurang berhasil memindahkan ibu kota negaranya, yakni Tanzania, Pantai Gading, Sudan, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, Vietnam, Pakistan, Laos,

Oman, Bhutan dan Botswana.

"Intinya, tidak semua proses pemindahan ibu kota negara semua sukses. Urgensi pemindahan ibu kota bukan sekadar urusan memindahkan dari Jakarta ke Kalimantan saja, namun harus mempertimbangkan segala aspek yang ditimbulkan dalam konteks pembangunan nasional," pinta Intan.

Ada sejumlah persyaratan yang perlu menjadi pertimbangan mendasar dalam memindahkan ibu kota yakni, lokasi, konstitusional, stabilitas ekonomi, tahapan teknis detail perencanaan, feasibility study (FS), migrasi penduduk, prioritas pembangunan, sumber dana, sumber daya manusia (SDM) dan aspek lainnya.

Rencana ini akan mempengaruhi berbagai lini kehidupan dan negara. "Karena pemindahan ini akan mempengaruhi banyak aspek, terutama kepastian usaha dan perekonomian di Indonesia. Harus dipastikan pemindahan ibu kota ini membawa benefit yang besar bagi bangsa ini kedepan," tuturnya.

Kata Intan, hal penting lainnya yaitu pemindahan ibu kota akan berpengaruh terhadap kesiapan masyarakat secara sosial, budaya dan politik serta pertahanan dan keamanan. Terlepas dari seberapa besar urgensi pemindahan ibu kota ini, akan tetapi masalah biaya juga harus diperhatikan. Sebab, ongkos pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan diperkirakan mencapai hampir Rp500 triliun.

Menurut Intan, sumber dana untuk memindahkan ibu kota ini harus dijelaskan pemerintah. "Apakah 100 persen murni dari APBN atau pinjaman/utang dari luar negeri. Sebab sampai sekarang, pemerintah belum membahas dengan DPR soal biaya pemindahan ibu kota ini," katanya.

Selain itu, DPR juga belum diberitahu oleh pemerintah besaran anggaran untuk melakukan kajian ilmiah atau feasibility study (FS). "Saya khawatir, ini hanya populis saja. Apalagi, dalam perjalanannya, saya menangkap kesan ada proses yang tidak

transparan," pungkasnya.

Sebaliknya, anggota Komisi II DPR Firmansyah Soebagyo menyatakan, pemindahan ibu kota harus sesegera mungkin. Sebab, kondisi Pulau Jawa sangat rentan terhadap bencana. Menurutnya, segala hal yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan di ibu kota negara harus diantisipasi.

"Saya menyarankan pemerintah melakukan studi banding ke Brasilia, ibu kota Brasil. Kantor pemerintahan di sana seperti di Jalan Thamrin, berdekatan jadi koordinasi antarkeementerian enggak usah pakai mobil cukup jalan kaki," tukasnya, kemarin. Politikus Partai Golkar itu mengatakan, untuk saat ini sebaiknya pemerintah diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menyusun dan merencanakan tahapan-tahapan proses pemindahan. Pertama, harus dibuat dasar aturan hukumnya seperti apa. Setelah itu, Bappenas akan membuat skema anggarannya seperti apa. (aen)

Intan Fauzi

FRANSAPR.COM